

BUKTI BARU

Program JKN Kian Kuat, BPJS Kesehatan Cetak SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

AmeliaRiski_JIS Sumbar - SUMBAR.BUKTIBARU.COM

Jul 2, 2026 - 16:20



Judul:

Program JKN Kian Kokoh, BPJS Kesehatan Perkuat SDM Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

Meta Deskripsi:

BPJS Kesehatan memaparkan capaian Program JKN 2025 yang telah melindungi 282,7 juta penduduk Indonesia. Program JKN terus memperkuat akses layanan kesehatan, transformasi digital, dan tata kelola untuk mendukung SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci SEO:

Program JKN 2025, BPJS Kesehatan, Public Expose BPJS Kesehatan, peserta JKN, SDM sehat, Indonesia Emas 2045, Mobile JKN, PANDAWA, layanan kesehatan, Universal Health Coverage

Tag SEO:

BPJS Kesehatan, Program JKN, Public Expose 2025, JKN Kuat, SDM Sehat, Indonesia Emas 2045, Universal Health Coverage, Mobile JKN, PANDAWA, Pelayanan Kesehatan

JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang akuntabel, kondisi keuangan yang sehat, serta transformasi layanan digital yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn.) dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S., dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud transparansi dalam pengelolaan Program JKN.

Menurut dr. Pujo, Program JKN telah berkembang menjadi instrumen strategis negara dalam menjamin kesehatan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produktivitas nasional.

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujarnya.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau setara 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya cakupan kepesertaan tersebut diikuti meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan yang mencapai lebih dari 725,3 juta kunjungan sepanjang tahun 2025 atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata dr.

Pujo.

Untuk meningkatkan kemudahan layanan, BPJS Kesehatan menghadirkan berbagai inovasi digital, di antaranya Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Seluruh inovasi tersebut didukung jaringan pelayanan yang semakin luas dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga didukung kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang tetap sehat dan akuntabel. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun dengan kemampuan memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan. Sementara hasil investasi Dana Jaminan Sosial mencapai Rp3,94 triliun sebagai bukti pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.

Dari sisi tata kelola organisasi, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kali berturut-turut atau ke-34 kali sejak era PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor tata kelola organisasi sebesar 97,67, skor maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC) sebesar 4,01, skor Baldrige Excellence Framework (BEF) sebesar 685, serta skor Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 80,48.

Program JKN juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, dan layanan sosial.

Kajian tersebut juga menunjukkan Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya pelayanan kesehatan. Selain itu, setiap kenaikan satu persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, meningkatkan angka harapan hidup hingga tiga tahun, serta mendorong produktivitas masyarakat.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan terus menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program. Sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini.

Karena itu, BPJS Kesehatan terus mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kolektabilitas iuran, serta melakukan pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan

mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimistis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045," ujar dr. Pujo.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. Dr. dr. Stevanus Adrianto Passat, MKK, MH, C.Med, CIRP, QRG, FIMMA, menegaskan BPJS Kesehatan memikul amanah besar dalam mengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja. Karena itu, penyelenggaraan Program JKN harus terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, dan penguatan tata kelola Program JKN. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E., menyatakan bahwa pembiayaan kesehatan melalui Program JKN merupakan investasi jangka panjang dalam membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar yang dibuat: Literasi digital untuk masa depan aman

Gambar yang dibuat: Literasi digital untuk masa depan aman
Gambar yang dibuat: Literasi digital untuk masa depan aman

ChatGPT, Bantu perbaiki foto ini agar jelas resolusi tinggi dan tidak rusak lagi

Gambar yang dibuat: Lelaki santai dengan senyum lembut

Gambar yang dibuat: Lelaki santai dengan senyum lembut

Gambar yang dibuat: Lelaki santai dengan senyum lembut

Gambar yang dibuat: Pria duduk santai tengah memilih beras

Gambar yang dibuat: Pria duduk santai tengah memilih beras

Gambar yang dibuat: Pria duduk santai tengah memilih beras

ChatGPT, Bantu perbaiki foto ini agar jelas resolusi tinggi dan tidak rusak lagi

Gambar yang dibuat: Potret Studio Vintage dengan Sentuhan Retro

Gambar yang dibuat: Potret Studio Vintage dengan Sentuhan Retro

Gambar yang dibuat: Potret Studio Vintage dengan Sentuhan Retro

Berikut caption TikTok yang ramah, mudah dibaca, dan ramah algoritma pencarian (SEO):

Momen penuh makna mewarnai rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Polres Solok. Perayaan ditandai dengan pembawaan kue ulang tahun dan nasi tumpeng yang secara simbolis diserahkan oleh Kapolres Solok AKBP Agung Pranajaya, S.I.K. kepada anggota dengan NRP tertua, AKP Edy Adwar, S.H., serta anggota dengan NRP termuda, Bripda Adrianto dari Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Solok.

Tradisi ini menjadi simbol penghormatan kepada para senior atas dedikasi dan pengabdian, sekaligus bentuk apresiasi kepada generasi muda Polri yang akan melanjutkan estafet pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Selamat Hari Bhayangkara ke-80.

Polri untuk Masyarakat, mengabdikan dengan hati, melayani dengan sepenuh hati.

#HariBhayangkara80 #PolriUntukMasyarakat #PolresSolok #KapolresSolok
#AKBP AgungPranajaya #HUTBhayangkara #PolriPresisi #PolisiIndonesia
#SumateraBarat #Solok #PengabdianPolri #SatTahti #ViralSolok #InfoSolok
#TikTokNews #BeritaPolri #IndonesiaMaju

Buatkan berita berkualitas search engine dengan judul yang menarik singkat padat tepat jelas lugas dan informatif ramah pencarian metadata lengkap dengan tag seo tanpa poin penomoran serta tanpa gaya tulisan huruf tebal tentang Public Expose pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang dilakukan secara offline dan daring pada Kamis, 2 Juli 2026, terhubung seluruh Kantor wilayah dan cabang se Indonesia, dengan mengusung Tema JKN Kuat, Rakyat Sehat, ekonomi melesat.

Hadir langsung Direktur utama dr. Pujo dan jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Ketua dewan pengawas dan jajaran pengawas, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E. Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar serta Senior leader, senior manager BPJS Kesehatan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Stevanus Adrianto Passat, MKK, MH, C.Med, CIRP, QRGF, FIMMA menyampaikan memiliki arti penting sebagai wujud transparansi akuntabilitas selain itu moment ini menjadi Media untuk menunjukan bahwa tugas yang diemban dikelola dengan amanah dan tanggungjawab

Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S. (dr. Pujo) Hingga akhir 2025, jumlah peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia, sementara pendapatan iuran meningkat menjadi Rp176,72 triliun dibanding pada tahun 2024 yang tercatat 165,34. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya program JKN sebagai instrumen perlindungan kesehatan nasional, sekaligus investasi pembangunan sumber daya manusia.

Ditambahkan dr.Pujo, Program JKN merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya. Program ini juga menjadi bagian dari Asta Cita Presiden untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Lebih jauh dijelaskannya, jumlah peserta JKN meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai 278,1 juta jiwa.

Selain itu, cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah tercapai di 30 provinsi dan 407 kabupaten/kota.

Menurutnya, perluasan kepesertaan diikuti dengan peningkatan akses layanan, agar masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan administrasi maupun informasi Program JKN.

Sepanjang 2025, layanan BPJS Keliling mencatat 698.227 transaksi di 30.317 titik layanan, sedangkan Mal Pelayanan Publik melayani 736.268 transaksi di 265 lokasi.

Lebih lanjut Prihati menjelaskan, BPJS Kesehatan juga terus memperluas kemudahan pembayaran iuran.

Hingga akhir 2025, tersedia 955.470 kanal pembayaran melalui perbankan, gerai ritel, e-commerce, PPOB hingga fasilitas auto debit.

Program telecollecting berhasil menghimpun pembayaran iuran sebesar Rp1,55 triliun, sedangkan pengingat melalui WhatsApp Blast menghasilkan pembayaran Rp1,49 triliun.

Adapun program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) mencatat pembayaran tunggakan sebesar Rp355,53 miliar dari sekitar 1,2 juta peserta, yang mengikuti program tersebut.

Tingkat kolektabilitas iuran juga naik menjadi 99,49 persen dari sebelumnya 99,17 persen. seluruh dana iuran yang terkumpul digunakan berdasarkan prinsip gotong royong untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta JKN.

Judul:

BPJS Kesehatan Paparkan Kinerja 2025, Peserta JKN Capai 282,7 Juta Jiwa

Meta Deskripsi:

BPJS Kesehatan menggelar Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2025. Peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa dengan pendapatan iuran Rp176,72 triliun serta layanan digital yang terus berkembang.

Kata Kunci SEO:

BPJS Kesehatan, Public Expose BPJS Kesehatan 2025, JKN 2025, peserta JKN, Universal Health Coverage, BPJS Kesehatan Indonesia, Program JKN, dr Pujo, pendapatan iuran BPJS, layanan BPJS Kesehatan

Tag SEO:

BPJS Kesehatan, JKN Kuat Rakyat Sehat Ekonomi Melesat, Public Expose 2025, JKN Indonesia, Universal Health Coverage, Peserta JKN, Pelayanan Kesehatan, Transformasi Digital BPJS, BPJS Watch, Dewan Pengawas BPJS

BPJS Kesehatan menggelar Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2025 secara luring dan daring yang terhubung dengan seluruh kantor wilayah dan kantor cabang BPJS Kesehatan di Indonesia, Kamis (2/7/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema "JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat" sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Public Expose dihadiri langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S. atau dr. Pujo beserta jajaran direksi, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Stevanus Adrianto Passat, MKK, MH, C.Med, CIRP, QRGF, FIMMA bersama jajaran pengawas, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E., Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, serta para senior leader dan senior manager BPJS Kesehatan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa Public Expose memiliki arti penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program maupun keuangan BPJS Kesehatan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi media untuk menunjukkan bahwa amanah yang diberikan kepada BPJS Kesehatan dikelola secara bertanggung jawab dan profesional.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan dr. Pujo menyampaikan bahwa hingga akhir tahun 2025 jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau setara 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 278,1 juta peserta.

Selain peningkatan jumlah peserta, pendapatan iuran Program JKN juga mengalami kenaikan menjadi Rp176,72 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp165,34 triliun. Menurut dr. Pujo, capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya Program JKN sebagai instrumen perlindungan kesehatan nasional sekaligus investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Program JKN merupakan komitmen nyata negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan juga mencatat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah diraih di 30 provinsi dan 407 kabupaten/kota. Seiring dengan perluasan kepesertaan, BPJS Kesehatan terus meningkatkan akses layanan agar masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan administrasi maupun informasi Program JKN.

Sepanjang tahun 2025, layanan BPJS Keliling mencatat 698.227 transaksi yang

dilaksanakan di 30.317 titik layanan. Sementara itu, layanan di Mal Pelayanan Publik berhasil melayani 736.268 transaksi yang tersebar di 265 lokasi di berbagai daerah.

Dalam mendukung kemudahan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan telah menyediakan 955.470 kanal pembayaran melalui perbankan, gerai ritel, e-commerce, Payment Point Online Bank (PPOB), hingga fasilitas auto debit.

Transformasi digital juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan peserta. Program telecollecting berhasil menghimpun pembayaran iuran sebesar Rp1,55 triliun, sedangkan layanan pengingat melalui WhatsApp Blast menghasilkan pembayaran sebesar Rp1,49 triliun.

Selain itu, Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) berhasil mencatat pembayaran tunggakan sebesar Rp355,53 miliar dari sekitar 1,2 juta peserta yang mengikuti program tersebut. Tingkat kolektabilitas iuran juga meningkat menjadi 99,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 99,17 persen.

Dr. Pujo menegaskan seluruh dana iuran yang dihimpun BPJS Kesehatan dikelola berdasarkan prinsip gotong royong untuk membiayai pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN. Menurutnya, keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah peserta maupun penerimaan iuran, tetapi juga dari semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Melalui Public Expose ini, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat inovasi layanan berbasis digital, menjaga keberlanjutan Program JKN, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Buatkan berita berkualitas search engine dengan judul yang menarik singkat padat tepat jelas lugas dan informatif ramah pencarian metadata lengkap dengan tag seo tanpa poin penomoran serta tanpa gaya tulisan huruf tebal tentang Program JKN Makin Kuat, Cetak SDM Sehat untuk Indonesia Hebat

Jakarta – Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025, Kamis (2/7).

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan

kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo.

Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," terang Pujo.

Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.

Selain itu, Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo.

Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional.

"Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat," ucap Stevanus.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari

peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kedeputian Bidang Komunikasi Organisasi

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Website www.bpjs-kesehatan.go.id

Judul:

Program JKN Kian Kuat, BPJS Kesehatan Cetak SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Meta Deskripsi:

BPJS Kesehatan memaparkan capaian Program JKN 2025 dengan 282,7 juta peserta. Program JKN dinilai menjadi fondasi pembangunan SDM unggul melalui layanan kesehatan berkualitas, tata kelola yang baik, dan transformasi digital.

Kata Kunci SEO:

Program JKN 2025, BPJS Kesehatan, Public Expose BPJS Kesehatan, peserta JKN, SDM unggul Indonesia, Universal Health Coverage, Mobile JKN, PANDAWA BPJS, BPJS Watch, Indonesia Emas 2045

Tag SEO:

BPJS Kesehatan, Program JKN, Public Expose 2025, JKN Kuat, SDM Unggul, Universal Health Coverage, Mobile JKN, PANDAWA, Transformasi Digital,

JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang akuntabel, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan digital yang semakin mudah diakses.

Capaian tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn.) dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S., atau dr. Pujo, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi dalam pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025.

Menurut dr. Pujo, Program JKN telah berkembang menjadi instrumen strategis negara dalam menjamin kesehatan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan produktivitas nasional.

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat terus berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa," ujarnya.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan pemanfaatan layanan kesehatan yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.

BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan, seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Inovasi tersebut didukung oleh jaringan pelayanan yang semakin luas, meliputi 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun dengan kemampuan memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan. Sementara hasil investasi Dana Jaminan Sosial mencapai Rp3,94 triliun yang mencerminkan pengelolaan dana secara hati-hati dan profesional.

BPJS Kesehatan juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kali berturut-turut atau ke-34 kali sejak era PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan meraih skor tata

kelola organisasi sebesar 97,67, skor maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC) sebesar 4,01, skor Baldrige Excellence Framework (BEF) sebesar 685, serta skor Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 80,48.

Tidak hanya memberikan manfaat di bidang kesehatan, Program JKN juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan efek berganda bagi sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.

Kajian tersebut juga menunjukkan Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya pelayanan kesehatan. Selain itu, setiap kenaikan satu persen kepesertaan JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, meningkatkan angka harapan hidup hingga tiga tahun, serta mendorong produktivitas masyarakat.

Meski demikian, dr. Pujo mengakui tantangan keberlanjutan program terus meningkat. Sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.

Karena itu, BPJS Kesehatan terus mengoptimalkan program promotif dan preventif, meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat kolektabilitas iuran, serta melakukan pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin kuat dan mampu membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045," kata dr. Pujo.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. Dr. dr. Stevanus Adrianto Passat, MKK, MH, C.Med, CIRP, QRGF, FIMMA, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memikul amanah besar dalam mengelola dana publik sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas harus terus dijaga. Menurutnya, Public Expose menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus media untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Program JKN.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola Program JKN. Hal senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E., yang menyebut pembiayaan kesehatan melalui Program JKN merupakan investasi jangka panjang dalam

membangun modal manusia, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui berbagai capaian tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keberlanjutan Program JKN melalui inovasi, kolaborasi, dan tata kelola yang baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Buatkan berita berkualitas search engine dengan judul yang menarik singkat padat tepat jelas lugas dan informatif ramah pencarian metadata lengkap dengan tag seo tanpa poin penomoran serta tanpa gaya tulisan huruf tebal tentang Program JKN Makin Kuat, Cetak SDM Sehat untuk Indonesia Hebat

Jakarta, 2/7/2026 – Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025, Kamis (2/7).

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo.

Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL),

dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," terang Pujo.

Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.

Selain itu, Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo.

Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional.

"Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat," ucap Stevanus.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," ungkap Telisa.

Melalui berbagai capaian tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keberlanjutan Program JKN melalui inovasi, kolaborasi, dan tata kelola yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh

masyarakat sebagai fondasi terwujudnya Indonesia Emas 2045.